

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT
(Studi Keberlanjutan Industri Kecil Menengah Mantan Tenaga Kerja Wanita
di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu)**

Oleh

Mu'min Ma'ruf

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri

e-mail: marufmumin@yahoo.com

ABSTRACT

*P*overty is a serious and urgent issue to overcome. The vulnerability caused by poverty not only affects the environment, but can extend to affect the resilience of the nation and state. For that government in 2010 through Presidential Regulation Number 15 issued an accelerated poverty reduction policy that focuses on family based social assistance, community based social handling, poverty reduction based on empowerment of micro and small business ventures.

Poverty in Regency Indramayu is caused by a lack of employment, so the poor are forced to seek employment abroad as Indonesian migrant workers and female workers. With the number of Indonesian migrant workers and female workers as many as 36.246 people. With the base of Indonesian migrant workers and female workers in Griyamendala Rural, Balongan District.

One of the solutions of Indramayu Regency Government in overcoming poverty for ex-Indonesian migrant workers and female workers is by creating groups of Small and Medium Industry that is Small and Medium Industry Cengkir group producing dry cake, wet cake, rempeyek, abon, salted egg and shrimp paste; Small and Medium Industry Mutiara ocean group that produces milkfish without burr; Small and Medium Industry Cantik group produces fish pilus; group of Small and Medium Industry Putra Pramuka produce processed mango fruit; and groups of Small and Medium Industry that fattening goats.

Keywords: poverty, policy, empowerment, small industry medium

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan serius dan mendesak untuk ditanggulangi. Kerentanan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun dapat meluas memengaruhi ketahanan bangsa dan negara. Untuk itu melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada bantuan sosial berbasis keluarga, penanggulangan sosial berbasis masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Kemiskinan di Kabupaten Indramayu disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, sehingga masyarakat miskin terpaksa harus mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI dan TKW. Dengan jumlah TKI dan TKW sebanyak 36.246 orang dengan basis TKI dan TKW di Desa Griyamendala Kecamatan Balongan.

Salah satu solusi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengatasi kemiskinan bagi mantan TKI dan TKW, yaitu dengan menciptakan kelompok-kelompok Industri Kecil Menengah (IKM), yaitu kelompok IKM Cengkir yang memproduksi kue kering, kue basah, rempeyek, abon, telur asin dan terasi rebon; kelompok IKM Mutiara samudra yang memproduksi bandeng tanpa duri; kelompok IKM Cantik memproduksi pilus ikan; kelompok IKM Putra Pramuka memproduksi olahan buah mangga; dan kelompok IKM yang melakukan penggemukan kambing.

Kata kunci: kemiskinan, kebijakan, pemberdayaan, industri kecil menengah

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan serius dan mendesak untuk ditanggulangi. Kerentanan yang ditimbulkan akibat kemiskinan tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun dapat meluas memengaruhi ketahanan bangsa dan negara. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan dapat mengancam keutuhan dan kemandirian bangsa serta dapat menjerumuskan bangsa menjadi bangsa yang selalu bergantung pada belas kasihan bangsa lain.

Persepsi tentang kemiskinan seyogianya harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang kompleks dan multidimensi meliputi kemiskinan secara struktural, politik, sosial budaya, lingkungan bahkan martabat manusia itu sendiri. Kemiskinan diartikan pada sebuah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi hak agar dapat hidup secara layak manusia yang bermartabat. Kesalahan persepsi terhadap persoalan kemiskinan akan mengakibatkan kesalahan dalam tata cara penanggulangannya, sehingga terjadilah kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Di negara berkembang seperti Indonesia, telah mengalami beberapa model pembangunan yang dilaksanakan. Model pertama adalah model yang menitikberatkan pada pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) sekitar dekade 1950-an dan 1960-an. Model ini terjadi banyak kesenjangan sosial dan eksplorasi alam yang berlebihan hanya untuk memenuhi tingginya GNP.

Sendi-sendi pembangunan hanya dikuasai segelintir pihak saja, sementara umumnya masyarakat Indonesia tidak mempunyai akses langsung atas kepentingan yang harus dipenuhinya.

Model pembangunan kedua dilaksanakan pada dekade 1970-an dengan titik berat arah pembangunan pada upaya pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Walaupun digunakan untuk mengantisipasi dampak negatif akibat model pembangunan yang pertama, namun model pembangunan yang kedua ini pun tidak lepas dari kendala pemenuhan modal yang sangat besar untuk memenuhi keperluan pemerataan tersebut. Akibatnya Indonesia memerlukan hutang yang sangat besar agar pemerataan dan pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terlaksana. Dampak negatif model ini adalah berkurangnya kemandirian dan kebebasan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sendiri.

Berdasarkan contoh dampak model-model pembangunan yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa pembangunan pada khususnya penanggulangan kemiskinan tidak hanya diselesaikan melalui peningkatan pendapatan semata ataupun melalui pemerataan dan pemenuhan kebutuhan, namun lebih kompleks karena melibatkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan mendapat informasi (demokrasi) serta hak persamaan kesempatan dalam aspek pembangunannya (transparansi,

akuntabilitas, kesetaraan gender dan lain-lain).

Dewasa ini seiring dengan isu perdagangan global yang bebas, pembangunan negara umumnya diarahkan pada titik berat peningkatan daya saing dan kemitraan global dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk memperkuat daya saing dan memperluas kemitraan saat memasuki era perdagangan bebas dengan ciri *Borderless World Economy*. Model pembangunan ini, menghendaki prasyarat adanya pola pembangunan yang menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengutamakan keunggulan sumber daya manusia dalam mengolah potensi-potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara, serta pendekatan yang berorientasi pada pembangunan manusia itu sendiri (*Human Development*). Pembangunan berorientasi manusia ini diharapkan dapat mendorong pembangunan kemitraan yang dinamis dan didasari nilai-nilai budaya universal seperti demokratisasi dan kesetaraan gender sebagai fokusnya.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, sesungguhnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha ataupun oleh pemerintah sebagai lembaga pelindung dan pengayom masyarakat. Namun kenyataannya angka kemiskinan yang ada relatif masih tinggi dan ada kecenderungannya bertambah. Kondisi yang terkesan kontradiktif antara upaya dengan hasil ini tentu harus dicarikan upaya-upaya penyelesaiannya agar potensi yang dimiliki baik oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah tidak hanya tersalurkan pada hal kemiskinan semata, namun dapat terkondisikan pula untuk hal-hal lainnya yang menjadi tujuan pembangunan masyarakat dan bangsa.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada bantuan sosial berbasis keluarga, penanggulangan sosial berbasis masyarakat, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah untuk:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
4. Menynergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat provinsi, kabupaten/kota pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Kabupaten Indramayu merupakan sebuah kabupaten yang potensial, yaitu sebagai salah satu daerah sentra pertanian dan penyangga stok pangan khususnya Provinsi Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Selain sektor pertanian, potensi Kabupaten Indramayu juga menghasilkan minyak, gas bumi dan perikanan yang menjadikan ribuan rakyat nelayan memanfaatkan Laut Jawa yang terletak di sebelah utara wilayah Indramayu, namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Padahal berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan

langsung seperti program keluarga harapan, juga melalui yayasan gerakan peduli rakyat keluarga miskin yang saat ini memiliki dana 14 miliar. Sedangkan bantuan tidak langsung berupa penyediaan dana pendidikan, pengobatan gratis dan membangun infrastruktur jalan desa (Abdul Koid Zaelani, 2011. <http://www.blockspot.co.id>).

Data Susenas Jawa Barat tahun 2013 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu setiap tahunnya mengalami penurunan, namun masih menduduki peringkat kedua tertinggi di Provinsi Jawa Barat (<http://www.news.fajarnews.com> Kamis, 5 November 2015, 08.50). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu tahun 2009 sebesar 319.630 jiwa (17,99%) dari jumlah penduduk yang mencapai 1.7 juta jiwa, tahun 2008 berjumlah 347 000 (19,75%) dan tahun 2007 berjumlah 361,700(20,86%).

Kemiskinan di Kabupaten Indramayu disebabkan sebagian besar petaninya bersatatus sebagai buruh tani dan petani penggarap. Berdasarkan data potensi desa di Kabupaten Indramayu tahun 2014 jumlah anggota keluarga yang menjadi buruh tani mencapai 38,32% dari 571.180 keluarga dan petani pemilik lahan kurang dari 0,5 dari 120.000 hektar yang dikenal dengan istilah petani gurem, sementara lahan pertanian yang luas hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di samping itu pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Indramayu sebagian besar masih bersifat tradisional, yaitu hanya memproduksi hasil pertanian berupa bahan baku yang nilainya lebih kecil jika dibandingkan setelah diolah menjadi produk padi. Penyebab kemiskinan lainnya adalah budaya masyarakat yang biasa menggelar hajatan besar-besaran, boros dan konsumtif. Demikian juga ketika panen raya tiba mereka banyak membelanjakan uangnya untuk barang konsumsi sehingga tidak ada uang untuk ditabung maka saat paceklik tiba, mereka mengalami kekurangan.

Meskipun dana *remittance* yang berasal dari warga yang bekerja di luar negeri tinggi sekitar 300 miliar, atau 5 (lima) kali PAD Kabupaten Indramayu tahun 2013 sebesar 2.121 triliun dan tahun 2014 sebesar 2.577 triliun tetap saja angka kemiskinan tinggi sebab uang tersebut habis dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, memperbaiki rumah dan membeli perabot rumah tangga yang bukan terkategori kegiatan produktif. Ditambah dengan adanya pembiaran dan kurang pedulinya pemerintah daerah (Azun Mauzun Anggota FPKB DPRD Kabupaten Indramayu), yang mana seharusnya pemerintah peduli mengatasi kemiskinan melalui program ketersediaan lapangan kerja, optimalisasi konsep pertanian mandiri dengan komitmen produk unggulan menuju pangsa pasar yang siap bersaing,

Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, sehingga masyarakat miskin terpaksa harus mencari pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Demikian halnya dengan masyarakat miskin Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten yang warganya terbanyak menjadi TKI se-Jawa Barat sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Humas P2TKI di Jakarta pada hari Minggu, 16 November 2014 di <http://www.Metronews.com> bahwa " Jumlah TKI yang berasal dari Jawa Barat sebesar 79.862 orang yang berasal dari Indramayu 16.246 orang, Cirebon 11.246 orang, Cianjur 8.406 orang, Sukabumi 6,767 orang, Subang 6.427 orang, Karawang 6.408 orang dan Majalengka 4.173 orang." Namun demikian berdasarkan data BNP2TKI menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indramayu yang menjadi TKI tahun 2013 sebesar 80.015 orang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Tahun 2011 jumlah TKI Kabupaten Indramayu sebanyak 29.966 orang, tahun 2012 sebanyak 28.524 orang dan tahun 2013 sebanyak 21.525 orang (<http://www.jpnn.com>.)

Basis TKI di Kabupaten Indramayu adalah Desa Griyamendala yang terletak di

Kecamatan Balongan. Desa ini merupakan basis TKI terlihat dari data Disnakertrans tahun 2014 terdapat 19.428 jiwa menjadi TKW. dan berdasarkan data BNP2 TKI bekerja sama dengan OJK per April 2015 jumlah remitransi mencapai USD 3,11M (<http://buruhmigran.or.id>).

Berkurangnya jumlah TKI di Kabupaten Indramayu disebabkan sebagian mantan TKW lebih memilih bergabung dalam kelompok Industri Kecil Menengah dibanding harus kembali menjadi TKW. Belum banyaknya mantan TKW yang bergabung ke kelompok IKM disebabkan pendapatan dari IKM masih di bawah gaji yang diperoleh jika menjadi TKW. Kelompok IKM mantan TKW di Kabupaten Indramayu (<http://radarcirebon.com> 18 Februari 2015) antara lain:

1. Kelompok Cengkir yang berada di Desa Balongan Kecamatan Balongan yang berdiri sejak awal tahun 2013 dengan jumlah anggota pertama 12 orang. Kelompok ini memproduksi kue kering, kue basah, rempeyek, abon, telur asin dan terasi rebon. Uniknya produk yang dihasilkan masing-masing orang berlainan.
2. Kelompok Mutiara Samudra yang berada di Karangsong memproduksi bandeng tanpa duri;
3. Kelompok Cantik memproduksi Pilus Ikan
4. Kelompok Putra Pramuka di Desa Maja memproduksi olahan buah mangga; serta
5. Kelompok Griya Embek di Desa Griyamendala Kecamatan Balongan melakukan kegiatan penggemukan kambing. Kelompok ini yang beranggotakan 10 orang. (<http://buruhmigran.or.id>).

Belum tuntasnya masalah kemiskinan walaupun telah diupayakan berbagai cara penanggulangannya mendorong perlunya sesuatu pemikiran dan strategi

baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh kepada permasalahan kemiskinan itu sendiri, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat miskin selaku subjek penanggulangan masalahnya sendiri. Upaya ini tentu saja harus ditopang dan didukung oleh *stakeholders* lainnya karena kerentanan dan ketidakberdayaan yang dimiliki masyarakat miskin tersangkut paut pula dengan kepemimpinan dan peran *stakeholders* lain tersebut seperti Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun Lembaga Masyarakat.

Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat rakyat harus senantiasa aktif untuk menciptakan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dasar yang murah, mudah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak pada masyarakat miskin yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang lebih efisien dan efektif.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan keberlanjutan IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan.
2. Untuk mendeskripsikan tanggapan pengrajin IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan terhadap pendapatan yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif.

Dengan metode deskriptif pada desain penelitian ini, maka penulis akan mengetahui tentang bagaimana kajian percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Indramayu (studi keberlanjutan IKM mantan TKW).

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bermaksud membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata, Sumadi, 2006: 76). Lebih lanjut tentang metode penelitian deskriptif dinyatakan oleh Nazir (2005: 54) sebagai berikut. metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam hal metode penelitian berdesain kualitatif, Sugiyono (2008: 1) menyatakan bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Person*, adalah sumber data berupa orang (manusia) yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara, di antaranya:
 - a. Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Indramayu
 - b. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Indramayu

- c. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu
- d. Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Indramayu
- e. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten indramayu
- f. Kepala Bidang UMKM Kabupaten Indramayu
- g. Pelatih BLK Kabupaten Indramayu (3 Orang)
- h. Kepala Seksi Manajemen Usaha dan Pengembangan SDM UKM Dinas UKM Kabupaten Indramayu
- i. Camat Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu
- j. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Balongan
- k. Kepala Desa Sukareja
- l. Kepala Desa Balongan
- m. Kelompok Pengrajin IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu (10 orang).

2. *Place* adalah sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi, di antaranya: Kantor Dinas UKM Kabupaten Indramayu, Kantor Kecamatan Balongan, dan Kantor Desa.

3. *Paper* adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Paper dalam penelitian ini berupa:

- a. Buku *Kabupaten Indramayu dalam Angka*, buku petunjuk teknis tentang UKM, buku-buku literatur yang mendukung penulisan penelitian dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, adalah wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Adapun

teknik analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menyeleksi data

Langkah ini adalah untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan untuk diolah dan diproses.

2. Klasifikasi data

Tahap ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dapat dikelompokkan sesuai dengan keperluan untuk mempermudah dalam menganalisis, sehingga dapat mencerminkan tujuan dan permasalahan yang telah ditentukan.

3. Interpretasi data

Interpretasi merupakan tahap dalam menganalisis data guna mencari arti yang lebih luas dari jawaban yang telah diperoleh dengan jalan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan penemuan yang sudah ada. Untuk membahas setiap faktor yang ditayangkan dalam angket digunakan alat bantu persentase (Nazir, 2005: 346).

Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menginventarisir jumlah pengrajin IKM di Kabupaten Indramayu.

2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kajian percepatan penanggulangan kemiskinan (untuk keberlanjutan IKM Mantan TKW). Data dokumentasi diperoleh dari:

- a. TKPKD Kabupaten Indramayu.
- b. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu
- c. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu
- b. Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu

c. Pengrajin IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu.

3. Setelah mendapatkan data, penulis menganalisis:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan seperti apa yang dilakukan oleh Dinas UKM Kabupaten Indramayu dalam kaitannya dengan keberlanjutan IKM Mantan TKW di Kabupaten Indramayu.
- b. Bagaimana pendapatan pengrajin IKM Mantan TKW di Kabupaten Indramayu.

KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Berdasarkan data *Indramayu Dalam Angka Tahun 2015* bahwa jumlah penduduk Kabupaten Indramayu sebesar 1.708.551 jiwa dengan jumlah keluarga 605.559 pada 493.099 rumah tangga terdiri dari laki-laki 880.024 jiwa dan perempuan sebanyak 828.527 jiwa.

Kriteria kemiskinan di Kabupaten Indramayu mengacu pada indikator BKKBN. Dari 605.559 rumah tangga di Kabupaten Indramayu tahun 2014 yang berada pada kategori keluarga pra sejahtera sebanyak 29,6 %, keluarga sejahtera I sebanyak 28,2 %, keluarga sejahtera II sebanyak 23,4 %, keluarga sejahtera III sebanyak 13,6 % dan keluarga sejahtera III plus sebanyak 5,2 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga pra-sejahtera lebih besar dibandingkan dengan keluarga sejahtera I,II, III dan III plus dengan jumlah rumah tangga yang termasuk golongan menengah ke bawah sebanyak 248.105 atau sebesar (50,31%). secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Kriteria Kemiskinan di Kabupaten Indramayu

No	Kecamatan	Kel. Pra. Sejahtera	KS I	KS II	KS III	KS III+	JMI.
1	Haürgeulis	7.982	6.327	6.548	4.203	1.495	26.555
2	Gantar	7.592	7.511	4.499	2.190	1.051	22.845
3	Kroya	10.462	5.979	3.397	2.323	920	23.081
4	Gabuswetan	5.156	6.806	4.999	2.357	1.153	20.471
5	Cikedung	3.842	3.181	3.638	2.013	664	13.338
6	Terisi	6.830	5.285	2.893	2.185	595	17.788
7	Lelea	8.200	5.734	2.769	1.632	507	18.842
8	Bangodua	2.653	4.851	2.542	542	269	10.587
9	Tukdana	6.133	5.789	6.039	1.521	659	20.141
10	Widasari	1.918	4.687	3.739	1.604	209	12.157
11	Kertasemaya	2.656	6.228	5.686	2.464	962	17.996
12	Sukagumiwang	2.416	3.406	4.003	1.663	569	12.057
13	Krangkeng	6.942	5.393	6.116	3.151	687	21.289
14	Karangampel	3.221	3.273	3.646	6.426	1.220	17.604
15	Kedokanbunder	2.446	2.912	7.316	2.517	589	15.780
16	Juntinyuat	6.710	7.619	8.756	5.311	3.412	31708
17	Sliyeg	7.178	6.399	5.327	3.484	635	23.023
18	Jati Barang	5.001	7.471	7.714	3.658	842	24.668
19	Balongan	3.804	4.938	4.449	4.072	1.841	19.104
20	Indramayu	7.903	8.005	10.082	6.679	3.167	35.856
21	Sindang	5.032	5.019	4.007	2.188	897	17.213
22	Cantigi	4.895	3.012	1.698	583	236	10.424
23	Pasekan	3.066	2.757	1.872	908	641	9.244
24	Lohbener	5.273	6.686	4.704	1.620	427	18.710
25	Arahan	5.064	2.977	2.096	1.279	458	11.874
26	Losarang	5.679	5.550	3.828	3.606	879	19.542
27	Kandanghaur	11.664	9.403	4.077	3.139	2.274	30.557
28	Bongas	7.617	3.637	4.055	1.466	912	17.687
29	Anjatan	11.004	9.784	4.322	3.255	2.085	39.450
30	Sukra	4.755	4.596	3.206	2.354	681	15.592
31	Patrol	5.969	5.696	5.053	2.255	425	19.398
32	Tahu 2014	179.063	170.541	141.964	82.648	31.343	605.559
33	Tahun 2013	174.629	168.513	143.495	79.585	29.164	595.386
34	Tahun 2012	179.852	163.176	137.616	75.305	26.437	582.386

Sumber: Indramayu Dalam Angka 2015

Adapun jumlah rumah tangga dan jumlah rumah tangga menengah ke bawah secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Rumah Tangga Golongan Menengah ke Bawah di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Golongan Rumah Tangga Menengah ke bawah	Golongan Rumah Tangga Menengah ke bawah (%)
1	Haurgeulis	24.017	12.527	52,16
2	Gantar	16.477	9.069	55,04
3	Kroya	17.659	10.619	60,13
4	Gabuswetan	16.239	8.982	55,31
5	Cikedung	13.473	6.712	49,82
6	Terisi	17.350	8.909	51,35
7	Lelea	16.157	8.616	53,33
8	Bangodua	8.476	4.310	50,85
9	Tukdana	16.755	7.663	45,74
10	Widasari	9.637	5.076	52,67
11	Kertasemaya	16.366	8.903	54,40
12	Sukagumiwang	10.657	5.479	51,41
13	Krangkeng	18.289	9.935	54,32
14	Karangampel	17.044	7.528	44,17
15	Kedokanbunder	12.570	5.558	44,22
16	Juntinyuat	22.615	10.967	48,49
17	Sliyeg	18.070	8.918	49,35
18	Jati Barang	20.439	10.037	49,11
19	Balongan	10.579	5.422	51,25
20	Indramayu	30.201	13.413	44,41
21	Sindang	13.570	5.401	39,80
22	Cantigi	6.573	4.288	65,24
23	Pasekan	6.155	3.708	60,24
24	Lohbener	16.406	7.316	44,59
25	Arahan	9.365	4.824	51,51
26	Losarang	16.019	7.612	47,52
27	Kandanghaur	25.857	12.709	49,15
28	Bongas	14.291	7.698	53,87
29	Anjatan	24.106	11.562	47,96
30	Sukra	12.560	6.616	52,68
31	Patrol	15.127	7.728	51,09
Jumlah		493.099	248.105	50,32

Sumber: Indramayu Dalam Angka 2015

Salah satu penyebab masalah kemiskinan adalah tidak sebandingnya lapangan kerja yang tersedia dengan banyaknya pencari kerja. Demikian halnya di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu banyaknya pencari kerja tahun 2015 adalah 34.948 orang yang terpenuhi sebanyak 29.470 orang dan yang tidak terpenuhi sebanyak 5.469 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Pencari Kerja di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

Pencari Kerja Tahun 2014		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Lulusan Penaker yang belum Di tempatkan	Jumlah
Laki-laki	9.801	8.104	1.697	SD	327
Perempuan	25.138	21.366	3.772	SLTP	656
Jumlah	34.939	29.470	5.469	SLTA	3.609
				DIII	491
				Sarjana	386

Sumber: Disosnakertrans Kabupaten Indramayu 2015

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pencari kerja wanita lebih banyak dibandingkan dengan pencari kerja laki-laki dengan perbandingan 3: 1 atau 72% : 28 % dan yang terpenuhi sekitar 84% (29.470) orang sedangkan 16 % (5.469) orang belum terpenuhi. Dari 29.470 orang pencari kerja yang di tempatkan tersebut yang berangkat ke luar negeri (sebagai TKI) sebanyak 16.156 orang atau sekitar 54 %. Demikian halnya dengan tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri, Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih mendominasi dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki, yaitu sekitar 13: 1 atau 92 %: 7 %. Secara detail pencari kerja yang di tempatkan/bekerja di luar negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Indramayu yang Di tempatkan di Luar Negeri Tahun 2014

No	Negara Tujuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Malaysia	55	564	619
2.	Abu Dhabi	1	377	378
3.	Taiwan	1.124	6.979	8.103
4.	Singapura	2	2.429	2.431
5.	Brunei Darusalam	0	2	2
6.	Oman	7	2.204	2.211
7.	Hongkong	0	1.373	1.373
8.	Qatar	0	296	296
9.	Bahrain	5	738	743
Jumlah		1.194	14.962	16.156

Sumber: Disosnakertrans Kabupaten Indramayu 2015

Salah satu kewajiban TKI asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di luar negeri, yaitu tetap menjalin komunikasi lewat KBRI yang ada di negara setempat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui keadaan dan keberadaan TKI yang bersangkutan mengingat banyaknya kasus yang dapat menyimpannya seperti penganiayaan, gaji tidak dibayar, kecelakaan dan lain-lain.

Berdasarkan data Disosnakertrans Kabupaten Indramayu penanganan kasus TKI yang berasal dari Kabupaten Indramayu sebanyak 43 dari 7 (tujuh) jenis kasus yang terbanyak kasus putus komunikasi dan tidak dibayar upahnya oleh majikan. Dari 43 kasus yang ditangani tersebut yang telah diselesaikan 28 yang masih dalam proses penyelesaian 15 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Penanganan Kasus TKI di Kabupaten Indramayu Tahun 2014

No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Selesai	Proses
1.	Meninggal Dunia			
	Sakit	7	7	-
	Kecelakaan	2	2	-
	Bunuh Diri	-	-	-
2	Tidak Dibayar	10	5	5
3.	Putus Komunikasi	11	4	7
4.	Penganiayaan	1	1	-
5.	Tidak Sesuai Job	4	4	-
6.	Pemutusan Sepihak	-	-	-
7.	Pulang Karena :			
	a. Sakit	-	-	-
	b. Pelecehan seksual	-	-	-
	c. Kekerasan fisik	-	-	-
	d. Lain-lain	8	5	3
	Jumlah	43	28	15

Sumber: Disosnakertrans Kabupaten Indramayu Tahun 2015

Banyaknya kasus yang bisa menimpa TKI maupun TKW membuat sebagian dari mereka tidak kembali lagi ke negara tempat kerjanya. Namun demikian data terkait dengan purna/mantan TKI maupun TKW tidak tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Latpentrans (Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi) H. Iman Sulaiman, ST, M.Pd. saat wawancara pada hari Rabu, 4 Mei 2016 di ruang kerjanya yang menyatakan bahwa "Salah satu kendala yang kami hadapi adalah tidak adanya aturan yang mewajibkan TKI yang kembali ke Indonesia melaporkan diri ke dinas terkait di mana yang bersangkutan dikirim dari daerahnya masing-masing sehingga kami kesulitan untuk mendata. Jika data TKI Kabupaten Indramayu yang bekerja di luar negeri tersedia." Adapun data TKI asal Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Rekapitulasi TKI Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	L	P	JML	G TO G		TOTAL
					L	P	
1	Haurgeulis	67	599	655	3	-	668
2	Gantar	31	283	314	-	-	314
3	Kroya	30	265	295	5	1	300
4	Gabuswetan	44	393	437	5	1	442
5	Cikedung	24	220	244	3	-	247
6	Terisi	43	389	432	3	-	435
7	Lelea	44	392	436	9	1	446
8	Bangodua	30	269	299	11	1	311
9	Tukdana	63	571	634	14	2	650

10	Widasari	39	348	387	2	-	289
11	Kertasemaya	70	626	695	29	3	727
12	Sukagumiwang	37	329	366	5	1	371
13	Krangkeng	72	645	717	3	-	720
14	Karangampel	62	555	617	7	1	625
15	Kedokanbunder	70	626	695	11	1	707
16	Juntinyuat	154	1385	1539	28	2	1554
17	Sliyeg	92	830	922	21	2	945
18	Jati Barang	69	622	691	16	2	709
19	Balongan	52	471	523	93	9	625
20	Indramayu	69	620	689	38	3	716
21	Sindang	37	336	373	9	1	473
22	Cantigi	32	289	321	9	1	331
23	Pasekan	20	177	197	4	-	201
24	Lohbener	56	506	562	12	1	575
25	Arahan	27	242	269	4	-	273
26	Losarang	42	381	423	4	-	427
27	Kandanghaur	46	418	464	29	2	485
28	Bongas	38	340	378	9	1	388
29	Anjatan	98	886	984	5	1	990
30	Sukra	47	425	472	4	-	476
31	Patrol	51	456	507	5	1	512
Jumlah		1.655	14.892	16.547	395	39	16.934
(%)		(9,77%)	(87,94 %)	(97,71%)	(2,33%)	(0,23%)	(100 %)

Sumber: Disosnakertrans Kabupaten Indramayu 2015

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa TKI asal Kabupaten Indramayu di tahun 2015 didominasi oleh kaum perempuan, yaitu sebesar 14.931 orang atau sebesar 88 % dan TKI laki-laki sebesar 2.050 orang atau sebesar 12 % . TKI yang berasal dari Kecamatan Balongan sebanyak 625 orang atau sebesar 3,7 % . terdiri dari TKW 580 orang (84 %) dan TKI laki-laki 145 orang (16 %).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam Mewujudkan Keberlanjutan IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu

Untuk mewujudkan keberlanjutan IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu *melakukan pembinaan secara kontinua guna menumbuhkan kemandirian IKM* sebagaimana dikemukakan oleh Camat Balongan pada saat kami wawancarai hari Selasa, 3 Mei 2016 di ruang kerjanya bahwa “untuk mewujudkan kemandirian IKM kami melakukan pembinaan guna mewujudkan kemandirian IKM. Dalam melakukan pembinaan kami Bekerja sama dengan Dinas terkait dan PT Pertamina. Namun kadang yang terjadi sesudah pembinaan dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi sehingga kontinuitas kurang terjaga, apakah sudah mandiri atau belum karena kami tidak mempunyai anggaran. Ada kendala yang

dihadapi dalam mencapai keberlanjutan IKM Mantan TKW adalah keuangannya yang kurang, maka kami bekerja sama dengan Pertamina juga budaya boros dan cepat putus asa dari pelaku IKM itu sendiri." Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ibu Warsianti ketua kelompok Bumi Bali yang mempunyai usaha membuat pakaian seragam SD saat diwawancarai pada hari Rabu, 4 Mei 2016 di Kantor Kecamatan Balongan " Kami 20 orang mendapatkan pendampingan dari BP3TKI dan Buruh Migran Indonesia selama dua tahun." Demikian halnya dengan yang dikemukakan oleh tiga orang pelatih dari UPT BLK Kabupaten Indramayu yang diwawancarai di Kantor UPT BLK pada hari Rabu, 4 Mei 2016 yang menyatakan bahwa " untuk mewujudkan keberlanjutan usaha kami melakukan pendampingan dari Disosnakertrans dalam hal pengelolaan dan bank dalam hal permodalan"

Untuk mengetahui pendampingan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, maka penulis bahas sesuai dengan indikator keberlanjutan usaha sebagai berikut.

► **Pendampingan Keberlanjutan Produksi IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan**

Keberlanjutan produksi IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan dilihat berdasarkan dukungan bahan baku, tenaga kerja, modal, pelaku usaha, dukungan kelembagaan terkait.

Bahan Baku

Produksi IKM dapat berlanjut jika didukung ketersediaan bahan baku dan dukungan akses terhadap bahan baku. Hal ini diukur dari ketersediaan bahan baku serta keterjangkauan harga dari bahan baku tersebut. Kelompok IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan mendapatkan bahan baku dari wilayah setempat seperti pisang dan tempe merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Balongan dan mangga

dari wilayah Kabupaten Indramayu yang terkenal sebagai daerah penghasil mangga. Di samping itu juga udang rebon diperoleh dari nelayan sudu sebagai pemasok. Telur dari peternak itik mantan TKW bentukan CSR Pertamina. Namun demikian produk olahan mangga dan terasi sangat bergantung pada musim sehingga agar terjadi keberlanjutan produksi diperlukan peralatan seperti frizer yang berkapasitas banyak untuk olahan mangga, sedangkan untuk olahan terasi rebon dibutuhkan pemanas atau pengering mengingat udang rebon banyaknya di musim hujan sementara dalam fermentasi diperlukan sinar matahari. Untuk telur didatangkan dari peternak itik yang juga termasuk dalam KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bentukan CSR Pertamina sehingga terjadi simbiosis mutualisma antara peternak itik dan pengguna telur itik juga antara nelayan *sudu* dengan pengusaha terasi udang rebon.

Melihat kondisi tersebut pelaku IKM memungkinkan mampu menjangkau harga bahan baku kecuali untuk produksi kue kering maupun kue basah yang berbahan baku terigu tentunya pengusaha tergantung pada harga pasar. Namun demikian dikarenakan produk dipasarkan sendiri dan menentukan harga penjualan sendiri maka mereka dapat mengimbanginya dengan menaikkan harga jual produk sehingga pengusaha tidak merasa dipermainkan harga dalam memperoleh bahan baku. Menurut Ibrahim ketua KUBE kelompok UKM Kabupaten Balongan yang juga pengusaha minuman buah mangga saat diwawancarai pada hari Rabu, 4 Mei 2016 bahwa akses terhadap bahan baku khususnya mangga tergantung pada musim sehingga kalau musim mangga harus stok sebanyak-banyaknya dan dimasukkan ke dalam frizer hal senada juga dialami oleh Ibu Sokipah yang diwawancarai, 18 Mei 2016 di rumahnya bahwa " udang rebon itu banyaknya di musim penghujan sementara di musim hujan panas matahari kurang, Di samping itu jumlah nelayan sudu sudah

berkurang dikarenakan banyak yang beralih menjadi TKI. Pernah waktu itu ditawarkan oven oleh Pertamina tetapi saya tidak mau karena membutuhkan daya yang tinggi sementara listrik di rumah kami hanya berdaya 450 W”

Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan saat ini masih memanfaatkan tenaga kerja lokal baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan pengolahan makanan tidak begitu membutuhkan kemampuan dan keahlian khusus, yang diperlukan hanya ketepatan dalam menentukan ukuran dari bahan yang dibutuhkan.

Dari segi kuantitas mengingat pangsa pasar belum begitu besar masih cukup dengan memperdayakan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan konsep pengelolaan ekonomi lokal yang mampu memanfaatkan kapasitas dan potensi lokal. Bahkan ada yang memanfaatkan hubungan kekerabatan seperti usaha yang dilakukan Ibu Sokipah dalam wawancara kami hari Rabu, 18 Mei di rumahnya mengatakan” bahwa tenaga kerja kami berasal dari daerah sini saja yang masih saudara-saudara sendiri”. Dari sini jelas bahwa keberlanjutan IKM mantan TKW dilihat dari segi tenaga kerja akan mendukung keberlanjutannya.

Modal

Keberlanjutan produksi tercapai jika terdapat dukungan kemudahan akses terhadap modal. Dalam hal pendanaan secara internal dari pihak IKM sendiri biasanya lemah, di sisi lain secara eksternal dalam hal ini lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan belum berpihak pada IKM sementara ketersediaan dana dari berbagai kredit masih terbatas ditambah prosedur perolehan biasanya rumit dengan persyaratan administrasi dan jaminan yang cukup berat. Untuk itu Pemerintah Daerah

Kabupaten Indramayu sejak tahun 2013 telah melakukan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan dimaksudkan agar UMKM mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam usahanya sehingga mereka bisa berusaha secara maksimal dalam Meningkatkan ekonomi keluarga. Pendampingan ini dilakukan oleh Diskopindag kabupaten Indramayu bekerja sama dengan IPB sebagai lembaga konsultan. Program yang dijalankan tersebut merupakan program pemberdayaan UMKM menuju kemandirian ekonomi dengan model Gebrak Sipintar, yaitu Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpan Pinjam Tanpa Agunan dan Risiko.

Pelaku Usaha

Pelaku usaha kelompok IKM mantan TKW adalah pelaku usaha lokal. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi lokal (PEL) bahwa dalam mengembangkan ekonomi lokal diperlukan keterlibatan pelaku usaha lokal. Di samping itu, untuk mendukung keberlanjutan produksi diperlukan kemampuan dalam mengelola faktor produksi dan peralatan produksi sehingga memunculkan inovasi produksi.

Pelaku usaha IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan keberlanjutan produksinya mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam bentuk pelatihan manajemen kewirausahaan serta mendapatkan bantuan peralatan usaha sebagaimana dijkaskan Akim bahwa pendampingan dari BP3TKI dan Buruh Migran Indonesia hasil kerja sama Disosnakertrans memberikan pelatihan dalam menciptakan peluang kerja dan membaca kemampuan.

Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan lokal dalam mewujudkan keberlanjutan IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten

Indramayu diukur berdasarkan ketersediaan kemitraan antara lembaga pemerintah, swasta dan pelaku usaha lokal, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dukungan pemerintah, dan lembaga swadaya lokal terlihat dari adanya kerja sama antara Disosnakertrans dengan *International Organisation for Migration* dan Buruh Migran Indonesia, UPT BLK Kabupaten Indramayu baik pemerintah maupun swasta, Diskopindag dengan bank dan koperasi dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun CSR Rui VI Pertamina Balongan yang menggandeng LPPM IPB. Dukungan kelembagaan diberikan dalam bentuk pendampingan usaha dan pemasaran oleh Disosnakertrans, Diskopindag dan PT. Pertamina.

► **Pendampingan Keberlanjutan Pemasaran IKM Mantan TKW di Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu**

Keberlanjutan pemasaran kelompok IKM Mantan TKW diukur berdasarkan dukungan pelaku usaha dan dukungan kelembagaan.

- **Dukungan Pelaku Usaha Kelompok IKM Mantan TKW**

Keberlanjutan pemasaran berdasarkan dukungan pelaku usaha kelompok IKM mantan TKW diukur dari kemampuan kelompok IKM dalam mengakses pasar/informasi pasar dan kemampuan mengidentifikasi daya saing produk.

Akses pasar memegang peranan penting dalam menentukan keberlanjutan IKM. Meski IKM umumnya tidak mengetahui pemahaman yang memadai tentang pasar. Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan, tidak memahami sifat dan perilaku konsumen pembeli hasil produksinya, IKM juga tidak terbiasa dengan praktik-praktik modern, bahkan IKM juga tidak mampu menjaga kualitas dan kontinuitas produk, kurang disiplin

dan kadang cidera janji atas materi yang telah disepakati. Demikian halnya IKM seragam sekolah yang terkendala pada masalah pemasaran sehingga mengalami kemunduran dalam memproduksi yang tadinya terdiri dari 8 orang pengusaha sekarang tinggal satu orang, yaitu ketua kelompoknya saja Ibu Warsianti.

Kelompok IKM mantan TKW dalam memasarkan hasil produksinya kebanyakan masih di kios-kios maupun ritel di seputar wilayah Kecamatan Balongan. Namun demikian ada juga yang sudah sampai ke Jawa Timur dan Provinsi Banten sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sokipah di rumahnya pada hari Rabu, 18 Mei 2016 "berkat kualitas dan kemasan produk yang baik pemasaran terasi saya sudah merambah ke warung-warung di Indramayu bahkan sudah sampai ke Jawa Timur dan Banten dan jika tetangga yang menjadi TKI pulang sering membawanya ke negara ia bekerja dan dalam setahun mampu memproduksi sekitar 2 ton". Bahkan olahan terasinya berdasarkan www.cirebontrust.com mendapat predikat silver pada Indonesia CSR Award yang diberikan oleh Menko Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani.

Lain halnya dengan Eli Sawana koordinator kelompok Cengkir pemasaran produksinya masih terbatas di wilayah Kecamatan Balongan dengan omset penjualan sekitar 3-4 juta per bulan, sedangkan minuman mangga berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok Usaha Bersama Bapak Ibrahim di Kantor Kecamatan Balongan pada hari Rabu, 4 April "pemasaran minuman mangga sudah sampai ke Bandung dan Jogja Kepatihan dengan omset sekitar 4 juta per bulan atau 5 s.d 10 ribu per bulan. Bahkan DPR RI pernah memesan.

- **Dukungan Kelembagaan**

a) **Pemerintah**

Guna menjaga keberlanjutan pemasaran produk IKM khususnya obat dan

makanan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui Diskopindag beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain memfasilitasi IKM untuk kepengurusan sertifikat halal secara gratis guna memberikan rasa aman pada masyarakat yang mengonsumsinya dan untuk meningkatkan daya saing di pasaran juga melakukan promosi melalui pameran produk. Selain itu mengupayakan produk IKM bisa masuk ke Jogja kepatihan dan Surya.

b) Swasta

Dukungan kelembagaan swasta dalam mewujudkan keberlanjutan pemasaran produk IKM mantan TKW ditunjukkan dengan diresmikannya dua unit depot UMKM berukuran 25 m X 4 m di Jln Gatot Subroto Simpanglima Indramayu yang merupakan tindak lanjut dari pendampingan dan pelatihan sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pusat oleh-oleh khas indramayu hadir dalam peresmian Sekda Indramayu Achmad Bahtiar, Muspika Kabupaten Indramayu, tokoh masyarakat serta *senior manager operation and manufacturing* (SMOM) Rui VI Syafii Triyono Yuniarto dan jajaran tim manajemen WWW.pertamina.com 21 april 2014.

Pendapat Pengrajin IKM Mantan TKW Terhadap Pendapatan yang Diperoleh Dalam Usahanya

Setiap orang yang berusaha pasti mengharapkan pendapatan. Pendapatan memegang peranan penting bagi pengusaha untuk melangsungkan usahanya atau beralih ke usaha lain. Demikian halnya dengan pengrajin IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan. Keberlangsungan IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan selain ditentukan oleh keberlangsungan faktor produksi juga keberlangsungan pemasaran. Kedua hal tersebut akan berbanding lurus

dengan pendapatan yang di peroleh oleh para pengrajin/pengusaha. Dikarenakan semakin tinggi produksi dan semakin banyaknya permintaan pasar akan semakin banyak pendapatan yang diperoleh sehingga semakin tinggi pendapatan. Tingginya pendapatan yang diperoleh bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang terpenuhi menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat. Di bawah ini ada beberapa pendapat dari ketua kelompok IKM mantan TKW yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatannya sebagai pengrajin Industri Kecil Menengah yang digelutinya.

Eli Sawana (28 tahun) koordinator kelompok Cengkir mengaku bahwa usaha makanan rumahan yang dibuatnya mampu membantu ekonomi keluarga. Penghasilan bersih rata-rata 3-4 juta per bulan. Eli memproduksi makanan ringan kemasan dan makanan basah seperti brownis, lempeng dan lain-lain dengan pemasaran masih terbatas di wilayah kecamatan. Kelompok ini terbentuk atas usaha dan prakarsa Pertamina dengan LPPM IPB Eli Sawana selaku ketua kelompok cengkir yang memproduksi olahan kue basah dengan merk Zilque dipercaya oleh Dinas tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk penyedia snack box rutin sejak April 2014 hingga April 2015. Menurut Ana Kanan *Public relation section head* RU VI balongan salah satu yang dirasakan oleh para anggota kelompok adalah adanya multiplier effect di mana dari 1 anggota kelompok dapat mempekerjakan 5-8 orang anggotanya dalam memproduksi maupun mengemas hasil olahan produksinya.

Menurut Sulistyono Tim LPPM IPB saat melakukan monitoring dan evaluasi pada, 10-11 Februari 2015 mencontohkan Taryana awalnya diberi 10 ekor entok kini berkembang 99 ekor pendapatan 500.000-1.200.000 per bulan program perikanan tangkap Desa Majakerta awalnya pendapatan 600.000 setelah mendapat program kini

pendapatannya Rp1.200.000 per bulan. Eli Sawana omset 10 juta per bulan melalui *bakery*-nya. Untuk mengembangkannya dibentuklah KUBE/Kelompok Usaha Bersama www.cirebontrust.com 17 Feb 2015 15:39.

Lain halnya dengan Ibu Sokipah saat diwawancarai mengatakan bahwa pendapatannya dari usaha pembuatan terasi rebon cukup bisa membantu kebutuhan keluarga kurang lebih sekitar 4 juta per bulan. Selain itu juga dapat membantu mempekerjakan orang meski baru 5 orang itu pun masih saudara. Dalam satu tahun penjualan terasi sekitar 2 ton. Selain Sokipah anggota kelompok Cengkir lainnya yang pernah menjadi TKW adalah Suni, Yati, mahani, Uun.

Demikian halnya dengan Ibu Warsianti mengatakan pendapatnya bahwa "Pendapatan yang diperoleh *sih* sedikit Bu, ya sekedar bisa membantu kebutuhan sehari-hari. Karena pendapatan yang masih minim inilah kelompok Bumi Bali ini kurang berkembang dikarenakan permintaan pasar yang relatif sedikit. Di samping itu ada faktor keberatan dari para suami. Maka saat ini tinggal saya sendiri yang masih menekuni menjahit baju seragam. Adapun dana yang diberikan dalam bentuk peralatan oleh BMP3TKI saat itu kami jual dan kami jadikan untuk modal simpan pinjam dan sampai sekarang masih berjalan bahkan anggotanya bertambah menjadi 20 orang. Dana simpan pinjam berasal dari hasil penjualan mesin yang saat itu laku terjual seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian dipinjamkan kepada anggota kelompok sampai dengan saat wawancara dilakukan dana simpan pinjam telah berkembang menjadi 14 juta rupiah."

Menurut Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) UKM Ibrahim saat diwawancarai pada hari Rabu, 4 Mei 2016 di Kantor Kecamatan menjelaskan tentang

pendapatan IKM mantan TKW pengrajin minuman buah mangga "bahwa sebenarnya pendapatan dari usaha minuman buah mangga ya cukup bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga rata-rata kurang lebih Rp 4 juta per bulan. Dalam setahun permintaan minuman buah mangga kurang lebih 5000 s.d. 10.000 botol."

Sebagaimana dikutip dari www.m.jppn.com koordinator Griya Embek Muniah mantan TKW di Arab Saudi yang beranggotakan 10 orang di Desa Gala Mendala Kecamatan Balongan yang merupakan lokasi penggemukan kambing, bahwa kandang dibuat seperti rumah panggung di sekat 1x1 m 1 kambing dengan kapasitas 100 kambing baru terisi 30 meski sudah panen 3 kali dan kini masih dalam tahap pengembangan yang dibuat sejak Januari 2013 yang mendapat pendampingan dari International Organisation for Migration dan Buruh Migran Indonesia. Strategi yang digunakan adalah belanja kambing berbobot 20 kg yang sekilo betina seharga 34 ribu/kg untuk betina dan jantan 43 ribu per kilo. Jadi 1 ekor kambing rata-rata harganya ribu hingga 860 ribu 680. Awalnya belanja kambing ke Lampung karena dengan pertimbangan kualitas kambing bagus harga murah. Namun malah rugi karena di tengah perjalanan banyak kambing yang mati mungkin stres karena kejauhan. Akhirnya pada belanja kedua, ketiga dan ya mereka mendatangkan kambing dari Garut kualitas juga bagus dan murah serta lebih aman

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan keberlanjutan IKM mantan TKW di Kecamatan Balongan adalah melakukan pendampingan

baik pendampingan produksi maupun pemasaran.

Pendampingan produksi antara lain:

- 1) Peningkatan SDM melalui pelatihan peningkatan kualitas produksi dan pengepakan;
- 2) Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama dengan membentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dalam mendapatkan bahan baku dan pemasaran;
- 3) Penciptaan sinergi IKM mantan TKW dengan industri besar melalui pola kemitraan (aliansi);
- 4) Pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan.

Adapun pendampingan pemasaran berupa:

- 1) Mempermudah pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi halal dari Diskopindag dan MUI;
- 2) Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran dengan melibatkan IKM mantan TKW pada pameran produksi setiap tahun;
2. Tanggapan pengrajin IKM mantan TKW terhadap pendapatan yang diperoleh pada umumnya dapat membantu ekonomi keluarga.

SARAN

Untuk mewujudkan kemandirian usaha IKM mantan TKW agar mampu bersaing di pasar global diperlukan:

1. Peningkatan sinergi antara peran pemerintah selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping khususnya lembaga keuangan dalam mempermudah akses perkreditan;
2. Perluasan akses informasi jaringan perluasan IKM;
3. Pengembangan SDM pada IKM melalui IT (*Information Technology*);

4. Penguatan lembaga pendamping melalui peningkatan kemudahan akses dan *capacity building*;
5. Keaktifan bagi pelaku usaha kecil untuk Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk terus melakukan pembinaan dan pelatihan;
6. Perlunya dipupuk budaya cinta dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beratha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hakim, Abdul. 2004. *Statistika Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 1999. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Institute for Religious and Institutional Studies (IRIS) Press. Bandung.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Jusman, Iskandar. 1999. *Teori dan Isu Pembangunan*. Program Pascasarjana UNIGA Garut.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Otonomi dan pembangunan daerah Reformasi, Perencanaan, strategi dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Karim, A. Tarmizi, 2013, *Undang-Undang tentang Desa dan Upaya Menciptakan Kemandirian dalam Mewujudkan Masyarakat desa yang Sejahtera*, *Jurnal Berdaya 1*, Edisi Maret, Dirjen Pemberdayaan masyarakat Desa, Kementerian dalam Negeri, Jakarta Selatan.
- Marbun, B.N. 1996, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Industri Kecil*. Jakarta: Pustaka Binawan Pressindo.

- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Direksi Cipta
- Rahmat, Budi. 2013. *Model Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil Menengah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Saleh, Azhari Irsan. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, Jakarta: LP3ES
- Sumaryadi, I. Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur, Samarinda
- Tambunan. Tulus, 2001, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thohar, M. 2000, *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarsunu, Tulus. 2012. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Wasistiono. Sadu, 2002, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007, Program Kemitraan Bumh Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Keputusan Bupati Nomor 051.05/Kep.60.A.1-Bappeda/2015 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Indramayu.

Sumber Lain

Indramayu Dalam Angka Tahun 2015.

Renstra Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indramayu Tahun 2015.

Renstra Diskopindag Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015.

Balongan Dalam Angka Tahun 2015.

Website

Abdul Koid Zaelani, 2011. <http://www.blockspot.co.id>

<http://www.metronews.com>

<http://www.jpnn.com>

<http://buruhmigran.or.id>

<http://radarcirebon.com>. 18 Februari 2015

<http://www.kemenperin.go.id>